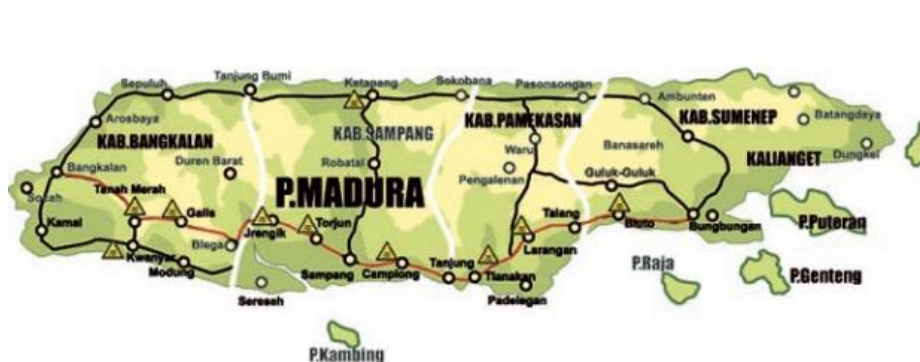


BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Pulau Madura

1. Peta Pulau Madura



Sumber: (Nasional Tempo, 2019)

Gambar 4. 1
Peta Pulau Madura

2. Geografis

Pulau Madura terletak diantara koordinat 113 32' 54' BT – 116 16' 48' BT dan diantara 4 55' LS – 7 24LS dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores dan Jawa
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Surabaya

Terdapat dua iklim di Pulau Madura yaitu musim hujan (nemor) dan musim kemarau (nambare`).

Secara administrasi di Pulau Madura terdapat empat Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan terletak di antara koordinat $6^{\circ}51'$ – $70^{\circ}11'$ Lintang Selatan dan antara $112^{\circ}40'$ - $113^{\circ}08'$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah Bangkalan adalah berupa daratan seluas 1.260.14 km².

Bangkalan memiliki batas-batas wilayah yaitu:

Utara : Laut Jawa
 Selatan : Selat Madura
 Barat : Selat Madura
 Timur : Kabupaten Sampang

Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan (Bappeda, 2019).

2. Kabupaten Sampang

Kabupaten ini terletak antara $113^{\circ}08'$ sampai dengan $113^{\circ}39'$ Bujur Timur dan $06^{\circ}05'$ sampai dengan $07^{\circ}13'$ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah Kabupaten Sampang sekitar 1233.30 km².

Secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Laut Jawa
 Sebelah timur : Kabupaten Pamekasan
 Sebelah selatan : Selat Madura

Sebelah barat : Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Sampang terdiri dari 14 Kecamatan dan 186 Desa/Kelurahan (Bappeda, 2019).

3. Kabupaten Pamekasan

Wilayah Kabupaten Pamekasan terletak pada $113^{\circ}19' - 113^{\circ}58'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}51' - 7^{\circ}31'$ Lintang Selatan. dengan ketinggian berkisar antara 6-312 meter dari permukaan laut (dpl). Dengan luas wilayah 79.230.01 Hektar.

Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan. Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pamekasan adalah

sebelah utara : Laut Jawa

sebelah selatan : Selat Madura

sebelah barat : Kabupaten Sampang

sebelah timur : Kabupaten Sumenep

(Bappeda, 2019)

4. Kabupaten Sumenep

Wilayah Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura yang terletak diantara $113^{\circ}32'54'' - 116^{\circ}16'48''$ Bujur Timur dan $4^{\circ}55' - 7^{\circ}24'$ Lintang Selatan. dengan batasbatas sebagai berikut :

sebelah selatan : Selat Madura

sebelah utara : Laut Jawa

sebelah barat : Kabupaten Pamekasan

sebelah timur : Laut Jawa dan Laut Flores

Kabupaten Sumenep terbagi kedalam 27 Kecamatan. 328 Desa dan 4 Kelurahan dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni (Bappeda, 2019).

2. Demografi

Tabel 4. 1
Demografi Kabupaten di Pulau Madura 2017
(dalam satuan ribu jiwa)

Kabupaten	2017		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Bangkalan	463789	507105	970894
Sampang	466920	491162	958082
Pamekasan	419489	443515	863004
Sumenep	514288	566916	1081204

Sumber: BPS 2019

Jumlah penduduk yang terdapat di Pulau Madura rata-rata di dominasi oleh perempuan dari setiap Kabupaten yang ada, dimana total jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kabupaten Sumenep dengan 1.081.204 jiwa pada tahun. Sedangkan Kabupaten Bangkalan berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk sebesar 970.894 jiwa. Disusul Kabupaten Sampang dengan 958.082 jiwa dan terakhir dengan jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Pamekasan yang pada tahun 2010 sebesar 863.004 jiwa.

B. Gambaran Umum Variabel

1. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut

Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu. Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
di Pulau Madura 2012-2017 (dalam satuan ribu jiwa)

Kabupaten	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bangkalan	229.00	217.40	212.16	216.23	205.71	206.53
Sampang	252.60	247.20	239.60	240.35	227.8	225.13
Pamekasan	160.30	153.10	148.76	146.92	142.32	137.77
Sumenep	231.40	224.60	218.86	216.84	216.14	211.92

Sumber: BPS 2018

Dari data di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Pulau Madura ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Meskipun dalam selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Kabupaten Sampang masih menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada di Pulau Madura, disusul Kabupaten Bangkalan yang fluktuatif dan tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Kabupaten ketiga dengan jumlah penduduk miskin adalah Kabupaten Sumenep yang selama tiga terakhir

mengalami penurunan. Dan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terendah di Pulau Madura adalah Kabupaten Pamekasan. Yang selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan jumlah penduduk miskin.

2. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) (BPS Jawa Timur, 2018).

Metode perhitungan IPM mengalami perubahan dikarenakan beberapa alasan:

1. Angka melek huruf tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM dikarenakan angka melek huruf secara utuh tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan sehingga sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan. Oleh karena itu dalam metoda baru angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah.

2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dalam metode baru PDRB diganti dengan produk nasional burto (PNB) per kapita.

Metode Penghitungan

Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Keunggulan IPM Metode baru :

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
2. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
3. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
4. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Tabel 4. 3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Pulau Madura 2012-2017 (Metode Baru dalam satuan persen)

TAHUN	Kabupaten			
	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep
2012	59.65	55.78	61.21	60.08
2013	60.19	56.45	62.27	60.84
2014	60.71	56.98	62.66	61.43
2015	61.49	58.18	63.1	62.38
2016	62.06	59.09	63.98	63.42
2017	62.3	59.9	64.93	64.28

Sumber: BPS 2018

Dari tabel data diatas menunjukkan tingkat IPM tertinggi berada di Kabupaten Pamekasan dimana pada tahun 2017 sebesar 64.93, disusul Kabupaten Sumenep dengan tingka IPM tertinggi kedua yaitu pada tahun

2017 sebesar 64.28, Kabupaten Bangkalan diurutan ketiga dengan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017 sebesar 59.9 dan dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah yang berada di Pulau Madura pada tahun 2017 adalah Kabupaten Sampang dengan IPM sebesar 59.9.

3. Produk Dimestik Regional Bruto

Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta (pengangguran menurun) serta dapat mengurangi angka kemiskinan (Parwata dkk, 2016).

Tabel 4. 4
PDRB AHDK 2010 Kabupaten di Pulau Madura 2013-2016
(milyar rupiah)

Kabupaten	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Bangkalan	16204	17369.2	16906.8	17018.7
Sampang	11623.8	11632.9	11874.5	12606.8
Pamekasan	8375.2	8846.2	9316.86	9815.77
Sumenep	20218.1	21476.9	21750.6	22311.7

Sumber: BPS 2019

Pada tabel diatas. PDRB Kabupaten yang terdapat di Pulau Madura cenderung mengalami kenaikan. Dimana PDRB paling tinggi diterima oleh Kabupaten Sumenep, posisi dua adalah Kabupaten Bangkalan. Ketiga

adalah Kabupaten Sampang dan terakhir dengan tingkat PDRB terendah adalah Kabupaten Pamekasan.

4. Tingkat Pengangguran

Tabel 4. 5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
di Pulau Madura 2010-2017 (dalam satuan persen)

Tahun	Kabupaten			
	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep
2010	5.79	1.77	3.53	1.89
2011	3.91	3.91	2.89	3.71
2012	5.32	1.78	2.30	1.19
2013	6.78	4.68	2.17	2.56
2014	5.68	2.22	2.14	1.01
2015	5.00	2.51	4.26	2.07
2016	5.28	2.77	4.19	2.00
2017	4.48	2.48	3.91	1.83

Sumber: BPS 2019

Dari data diatas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada di Kabupaten Bangkalan dimana pada tahun 2017 sebesar 4.48 persen. Dan Kabupaten Pamekasan diurutan kedua dengan tpt sebesar 3.91 persen ditahun yang sama. Kabupaten Sampang menempati urutan ketiga dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2.48 persen dan Kabupaten Sumenep berada diurutan paling rendah dengan tingkat tpt yaitu sebesar 1.83 persen ditahun yang sama yaitu 2010.

Terdapat pengelompokkan yang biasanya dilakukan oleh badan statistik negara. Dalam (Mankiw dkk, 2013) terdapat tiga pengelompokkan tentang pengangguran.

1. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja:

Angkatan kerja = jumlah orang yang bekerja + jumlah orang yang tidak bekerja.

2. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah orang yang tidak bekerja}}{\text{angkatan kerja}} \times 100 \quad (4.1)$$

3. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah untuk mengukur persentase jumlah populasi penduduk dewasa yang termasuk ke dalam angkatan kerja.

$$\text{Tingkat partisipasi angkatan kerja} = \frac{\text{Angkatan kerja}}{\text{Populasi penduduk dewasa}} \times 100 \quad (4.2)$$